

# **EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR**

(Studi Pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DELLARIZKI PRAMEISA**

**NIM. 145030101111093**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2018**

# MOTTO HIDUP

## “CINTA & IKHLAS”

*-Della Rizki Prameisa-*



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir (Studi Pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan)

Disusun Oleh : Dellarizki Prameisa

NIM : 145030101111093

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 06 Juli 2018

Komisi Pembimbing

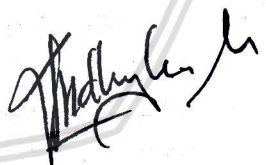
Ketua



**Oscar Radian Danar, S.AP, M.AP, Ph.D**

**NIP. 2011078705161001**

Anggota



**Andhyka Muttaqin, S.AP.,MPA**

**NIP. 2011078504210001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir (Studi Pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 06 Juli 2018



Dellarizki Prameisa  
145030101111093

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Skripsi Atas Nama : DellaRizki Prameisa

Judul : Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk Penanggulangan Banjir (Studi pada Desa Sironoboyo Kabupaten Pacitan)

**Dan dinyatakan LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

Ketua




**Oscar Radvan Danar, S.AP, M.AP, Ph.D**  
NIP. 2011078705161000

Anggota



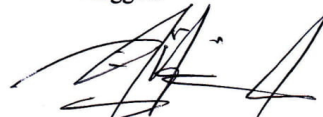
**Andhyka Muttagin, S.AP., MPA**  
NIP. 2011078504211000

Anggota



**Dr. M. Makmur, MS**  
NIP. 195110281980031002

Anggota



**Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP**  
NIP. 2013098610092001

Karya Ini Kupersembahkan  
Untuk Keluarga Besarku Tercinta  
Bapak Muhammad Daroji, Ibu Sunarni  
Kakak Dessy Alfiani, Adik Joceline Bernice Osfaldo





## RINGKASAN

Dellarizki Prameisa, 2018. **Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana Untuk Penanggulangan Banjir (Studi Pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Oscar Radyan Danar S.AP, M.AP, Ph.D, Andhykka Muttaqin, S.AP, M.PA 172 halaman + xiv

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah melalui program Desa Tangguh Bencana yang diatur di dalam Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012. Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang program desa tangguh bencana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi oleh fokus penelitian yaitu pertama proses pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana berdasar 6 Komponen yaitu Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sedangkan pada fokus kedua yaitu pada evaluasi program desa tangguh bencana berkaitan dengan *context, input, process, product*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model analisis data perbandingan tetap atau *constant comparative method* yang dikemukakan oleh Gleser & Straus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencanabelum mencapai tujuan dengan efektif dikarenakan masih terdapat masyarakat serta karang taruna yang belum terlibat secara aktif terhadap pentingnya pengelolaan bencana, selain itu kurangnya kapasitas dari tim relawan sehingga program tersebut belum mampu dikatakan tangguh karena masih adanya kekurangan pada program desa tangguh bencana tersebut. Evaluasi Program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir menunjukkan bahwa program desa tangguh bencana belum memberikan perubahan secara keseluruhan terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengetahui tentang ancaman bencana, belum dibentuknya rencana kontigensi, pendekatan penyebaran informasi dirasa masih kurang, pendidikan dan pelatihan tentang simulasi kebencanaan tersebut masih belum berhasil, relawan tidak mampu membantu dalam melakukan evakuasi terhadap masyarakat. Saran dari peneliti yaitu segera membuat rencana kontigensi, perlu adanya pembaruan strukstur organisasi tentang desa tangguh bencana, karang taruna dan nelayan perlu dilibatkan dalam forum pengurangan resiko bencana.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Desa Tangguh Bencana, Banjir*

## SUMMARY

Dellarizki Prameisa, 2018. Evaluation of Disaster Resilient Village Programs for Flood Mitigation (Study on Sirnobo Village of Pacitan Regency). Undergraduate Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya. Supervisor: Oscar Radian Danar S.AP, M.AP, Ph.D., Andhykka Muttaqin, S.AP, M.PA. 172 pages + xiv.

---

In Regulations Number 24 of 2007 Article 26 about Disaster Management affirms that everyone is entitled to social protection, security, especially to vulnerable groups of people. Everyone is also entitled to receive education, training and skills in disaster management. One of the efforts of implementation for disaster management is through the program of Disaster Resilient Village which is regulated in Regulation of BNPB No. 1 of 2012 The Disaster Resilient Village program is one of the community based disaster risk reduction efforts. The Purpose of this research is to evaluated about Disaster Resilient Village Programs.

This research used descriptive research with qualitative approach and limited by the focus of research, first is the implementation process of Disaster Resilient Village Program based on 6 components namely Legislation, Planning, Institutional, Funding, Capacity Building, and Disaster Management, second focus on evaluation of Disaster Resilient Village program related to context , input, process, and product. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis used comparative method of constant comparison analysis proposed by Gleser & Straus.

The result of this research shows that the implementation of the Disaster Resilient Village program has not reached the goal effectively because there are community and the youth who have not been actively involved in the importance of disaster management, the lack of capacity of the volunteer team so that the program has not been able to be strong because there are some deficiencies in the disaster village program. Evaluation of disaster village program in flood prevention indicates that the village's resilient program has not given an overall change to the community because the community does not know about the disaster threats, there is no contingency plan, the lack of information distribution, education and training on disaster simulation is not working yet, volunteers are not able to assist in doing evacuation to the community. Suggestions from the researcher are create contingency plans immediately, need a renewal structur organization of disaster resilient villages, youth and fishermen need to be involved in disaster risk reduction forums.

**Keywords:** Evaluation, Disaster Resilient Village, Flood



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kemudahan dan kelancaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir (Studi pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan)”**. Tidak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, manusia mulia yang merupakan idola dan suri tauladan bagi kita yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Fadilah Amin Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Bapak I Gede Eko Putra Sentanu S.AP., M.AP., Ph.D selaku sekretaris program studi Administrasi Publik serta seluruh staf Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

2. Bapak Oscar Radyan Danar, S. AP., M. AP., Ph. D selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Andhyka Muttain, S. AP., M. AP selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Keluarga Besar BPBD Kabupaten Pacitan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi-informasi kepada penulis.
5. Keluarga Besar Kantor Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi-informasi kepada penulis.
6. Kader-kader Desa Tangguh bencana dan warga Desa Sirnobojo yang telah memberi kesempatan untuk bersedia menyampaikan informasi kepada penulis.
7. Keluarga besarku tercinta Bapak Muhammad Daroji, Ibu Sunarni, Kakak Dessy Alfiani, Adik Joceline Bernice Osfaldo yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan materiil kepada penulis.
8. Keluarga keduaku di Malang, House Of 25 A Linda, Sintya, Risna, Mbak Firda, Mbak Fina, Mbak Lip, yang selalu membantu penulis, memberikan motivasi, doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi serta Lelakiku yang selalu setia memberi doa dan motivasi, serta mendengarkan keluh kesah penulis.

9. Anggota RESKRIM Polres Pacitan Bapak IPTU DHECKY TJAHYONO TRIYOGA S.Sos., S.H., M.H, Bapak AIPDA H. ANDIE KUNCORO S.H, Bapak BRIPDA RIZHAL ADDARIANTO, Bapak BRIPDA HILMI ICHWANNUDIN, Bapak BRIGADIR AGUS SUBBIYANTORO S.H, Reskrim Unit IV Tipidter Polres Pacitan yang memberi ijin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta selalu memberi motivasi kepada penulis.
10. Sahabatku Rina, Ike, Astin, Rahma, May, Tika, Dewi, yang selalu setia membantu, memberi doa dan motivasi, serta teman-teman Administrasi Publik angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun angat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membantu.

Malang, 12 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

MOTTO .....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	12
C.Tujuan Penelitian .....	13
D.Kontribusi Penelitian .....	13
E.Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Teori Evaluasi Program .....	16
1.Pengertian Evaluasi .....	16
2.Tujuan Evaluasi .....	18
3. Pengertian Program .....	19
4. Pengertian Evaluasi Program .....	20
5. Tujuan Evaluasi Program .....	22
6. Evaluasi CIPP .....	25
B. Bencana .....	30
1.Pengertian Bencana .....	30
2.Penyebab Bencana .....	32
3.Jenis Bencana .....	33
4.Penanggulangan Bencana .....	36
C. Desa Tangguh Bencana .....	39
1.Pengertian Desa Tangguh Bencana .....	39
2.Tujuan Desa Tangguh Bencana .....	47
D. Banjir .....	51
1. Pengertian Banjir .....	51
2. Faktor Penyebab Banjir .....	52
3. Jenis Banjir .....	53
5. Dampak Banjir .....	54

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	55
B. Fokus Penelitian .....	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	57
D. Sumber Data .....	58
E. Pengumpulan Data .....	59
F. Instrumen Penelitian .....	62
G. Metode Analisis data .....	62
H. Uji Keabsahan Data .....	66

**BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	68
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	68
2. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	83
B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian .....	87
1. Proses Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Berdasarkan 6 Komponen Desa Tangguh Bencana .....	87
2. Evaluasi Program Desa tangguh Bencana untuk Penanggulangan Banjir .....	117
C. Analisis Data .....	141
1. Proses Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Untuk Penanggulangan Banjir Berdasarkan 6 Komponen Destana... ..	141
a. Legislasi .....	141
b. Perencanaan .....	144
c. Kelembagaan .....	145
d. Pendanaan .....	146
e. Pengembangan kapasitas .....	147
f. penyelenggaraan penanggulangan bencana .....	148
2. Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana Untuk Penanggulngan Banjir .....	151
A. <i>Context</i> .....	151
B. <i>Input</i> .....	152
C. <i>Process</i> .....	156
D <i>Product</i> .....	158

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	170

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	172
-----------------------------	-----

<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	175
------------------------------	-----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kekayaan alam serta keindahannya. Namun dibalik keindahannya secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Ancaman tersebut setiap saat dapat menjadi bencana yang menimpa masyarakat. Salah satu penyebab bencana di Indonesia karena masyarakat tidak memahami karakteristik ancaman bencana. Seringkali dipahami adalah seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat tidak siap untuk menghadapinya. Akibatnya timbul korban jiwa dan kerusakan atau kerugian yang cukup besar. Menurut Nurjanah (2013:81) ancaman bencana tersebut merupakan akibat dari ulah manusia dan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar serta penyebarannya tidak merata yaitu 60% terpusat di Jawa dan Bali, ketimpangan sosial ekonomi yang cukup besar, keragaman suku, agama, etnik budaya,

ketidakpedulian, tingginya tingkat penyimpangan dalam memanfaatkan sumberdaya maupun kekayaan alam serta adanya ketidakadilan.

Semenjak beberapa tahun terakhir dan beberapa tahun yang akan datang, fenomena bencana akan menjadi salah satu isu besar yang mendapat perhatian ekstra dari berbagai pihak terutama pemerintah. Potensi gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi telah dialami bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana UN-ISDR (*United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction*) Indonesia menjadi negara yang paling berpotensi terhadap ancaman bencana di dunia. Tingginya posisi Indonesia ini dihitung berdasarkan dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa apabila terjadi bencana (BNPB, 2016).

Menurut Nurjanah (2013:8) bencana sering berdampak pada korban jiwa, luka, pengungsian, gangguan terhadap pola kehidupan normal, efek sosiologis dan psikologis, gangguan terhadap struktur sosial, kerusakan infrastruktur, gangguan pelayanan umum, bangunan atau gedung, jaringan komunikasi, lingkungan, dan kerusakan hasil-hasil pembangunan. Pada akhirnya dampak bencana tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2002 sampai tahun 2009 tersebut tercatat bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga dari adanya peningkatan kejadian bencana pada setiap tahun tersebut berdampak terhadap jumlah korban bencana, nilai kerusakan dan kerugian di beberapa sektor. Peningkatan kejadian bencana yang terjadi di

Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2009 tersebut terjadi dengan total peningkatan yang cukup besar.

Tabel 1 Jumlah Peningkatan Kejadian Bencana Di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Total Kejadian Bencana di Indonesia</b>
2002	190
2003	592
2004	895
2005	691
2006	814
2007	888
2008	1.306
2009	1.954

Sumber : Nurjanah, (2013:86)

Berdasarkan data kejadian bencana pada tabel tersebut bahwa kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2009 tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan kejadian bencana di Indonesia tersebut akan berpengaruh terhadap dampak kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Semakin banyaknya kejadian bencana di Indonesia maka bencana tersebut akan menjadi salah satu ancaman besar bagi masyarakat.

Selain data tersebut, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa berbagai jumlah bencana di Indonesia pada tahun 2016 meningkat. Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana, naik 35% jika dibandingkan pada tahun 2015. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tertinggi sejak pencatatan kejadian bencana pada 2002. Berdasarkan dari jumlah tersebut maka sebanyak 92% adalah bencana yang didominasi oleh bencana banjir, longsor dan puting beliung.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama tahun 2017 bahwa total kejadian bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.341 kejadian

bencana. Bencana pada tahun 2017 tersebut paling banyak di dominasi oleh banjir. Bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi sebanyak 786 kejadian bencana banjir.

Tabel 2 Total kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2016 -2017.

Bencana	Total 2016	Total 2017	Dampak 2016	Dampak 2017
Banjir	766	786	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 522 orang meninggal dunia dan hilang,</li> <li>• 3,05 juta jiwa mengungsi, menderita,</li> <li>• 69.287 rumah rusak berat, 13.077 rusak sedang, 47.039 rusak ringan,</li> <li>• 2.311 fasilitas umum rusak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 377 orang meninggal dan hilang</li> </ul>
Longsor	612	614		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.005 orang luka</li> </ul>
Puting Beliung	669	716		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.494.319 orang mengungsi menderita</li> </ul>
Banjir Longsor	74	76		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 47.442 rumah rusak</li> </ul>
Kebakaran Hutan, Lahan	178	96		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.457 rusak berat</li> </ul>
Gempa bumi	13	20		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26.515 rusak ringan</li> </ul>
Gunung Meletus	7			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 365.194 rumah terendam banjir</li> </ul>
Gelombag Pasang	23	11		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.083 unit bangunan fasilitas umum rusak</li> <li>• 1.272 unit fasilitas pendidikan</li> <li>• 698 unit fasilitas peribadatan</li> <li>• 113 unit fasilitas kesehatan</li> </ul>

Sumber : Olahan peneliti (2018)

Jika dilihat berdasarkan data dari tahun 2016 dan 2017 tersebut bahwa bencana yang paling banyak terjadi yang menduduki posisi pertama adalah di dominasi oleh bencana banjir yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Banjir merupakan suatu masalah yang rentan mengancam Indonesia. Persoalan banjir sudah menjadi tradisi tahunan yang wajib dirasakan apabila musim penghujan tiba. Banjir dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, serta dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa apabila bencana banjir besar terjadi. Menurut Suprawoto (2008:29) banjir adalah meluapnya air dari saluran dan menggenangi kawasan sekitarnya. Sekitar 90% dari kejadian bencana alam berhubungan dengan banjir. Ada 2 jenis banjir, yaitu banjir bandang kiriman dan banjir pasang-surut.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengantisipasi datangnya bahaya bencana, karena pada dasarnya pemerintah memiliki peran untuk melindungi warga dari berbagai bencana yang terjadi. Antisipasi tersebut bukan hanya dalam menyiapkan diri menghadapi bencana, namun juga untuk mengurangi dampak buruk akibat dari bencana yang terjadi. Sehingga untuk mengantisipasi datangnya bencana maka perlu mengidentifikasi dan merencanakan supaya semua pihak mengetahui cara yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana (BNPB, 2017).



Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Penanggulangan

Bencana, menyebutkan definisi bencana adalah

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sementara itu proses penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut harus melewati tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi ketika terdapat potensi terjadi bencana. Tahap tersebut disusun perencanaan tindakan-tindakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan, dan penanggulangan dampak bencana.

Pengelolaan bencana diperlukan dalam proses penanggulangan bencana. Pengelolaan bencana menurut Carter (Kodoatie, 2006:69) merupakan rangkaian ilmu pengetahuan untuk mencari, mengobservasi, dan menganalisis potensi bencana secara sistematis untuk menentukan tindakan pencegahan, pengurangan dampak bencana, persiapan, respon darurat serta pada tindakan pemulihan setelah terjadinya suatu bencana. Pengelolaan bencana membutuhkan peran aktif warga masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sehingga proses pengelolaan bencana dapat berjalan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2014-2019, pemerintah menargetkan menurunkan Indeks Risiko Bencana

Indonesia (IRBI) sebesar 30 persen di kabupaten atau kota pusat pertumbuhan dan berisiko bencana tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut salah satunya yaitu melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebanyak kurang lebih 5.000 desa. Program yang harus dilakukan setiap Desa Tangguh Bencana tersebut yakni analisis resiko dengan membuat peta ancaman, kerentanan, dan kapasitas, mendirikan forum relawan, rencana aksi komunitas, rencana kontijensi desa, membuat jalur evakuasi, jalur ekonomi untuk pembiayaan pasca bencana (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2014).

Salah satu daerah yang harus melaksanakan program Desa Tangguh Bencana adalah Jawa Timur karena secara geografis Jawa Timur memiliki potensi terjadinya bencana seperti banjir, tsunami, puting beliung, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Hampir seluruh daerah di Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BNPB menyatakan bahwa beberapa bencana besar sudah terjadi di Jawa Timur dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sekitar 460 desa merupakan klasifikasi tinggi ancaman bencana alam. Sedangkan pada tingkat sedang sampai rendah terdapat sekitar 2.000 desa atau kelurahan (BNPB, 2016).

Daerah di Jawa Timur yang berpotensi terhadap bencana adalah Kabupaten Pacitan karena dalam hal ini Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Pada peringkat pertama sampai dengan 5 daerah rawan bencana di dominasi Lumajang, Malang, Jember, Bayuwangi, Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan daerah berada pada peringkat 5 indeks

resiko tinggi. Bencana yang terjadi seperti banjir, gempa, tanah longsor dan tsunami. Banjir merupakan salah satu ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pacitan. Salah satu wilayah yang memiliki ancaman bencana dan sering terjadi bencana di Kabupaten Pacitan adalah Desa Sirnobojo. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Pacitan maka desa Sirnobojo yang memiliki ancaman bencana dan sering mengalami bencana. Desa Sirnobojo menghadapi 2 ancaman bencana yaitu tsunami dan banjir, namun bencana yang sering menimpa Desa Sirnobojo adalah banjir (BPBD, 2017).

Berdasarkan letak geografis, Desa Sirnobojo mayoritas berada pada ketinggian 4 sampai 6 meter di atas permukaan laut, dan dilewati oleh 2 sungai yaitu sungai Grindulu dan sungai Jelok. Akibatnya bencana banjir sering terjadi dan menimpa warga Desa Sirnobojo. Berdasarkan jumlah penduduk pada Desa Sirnobojo yang berjumlah 4.327 orang tersebut maka cukup besar untuk ukuran sebuah Desa di Kabupaten Pacitan. Akibat dari bencana banjir yang sering menimpa Desa Sirnobojo tersebut maka mengakibatkan berbagai macam kerugian serta berdampak pada hasil pertanian dan merusak infrastruktur jalan maupun jembatan (Pacitannews, 2017).

Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kabupaten Pacitan pada tahun 2016, banjir yang melanda pada Desa Sirnobojo tersebut adalah sebanyak 3 dusun di Desa Sirnobojo terdampak banjir, yakni Dusun Krajan, Dusun Suruhan dan Dusun Mendole. Akibat dari banjir di desa Sirnobojo tersebut, maka sebanyak 6 rumah warga terancam tidak bisa dihuni, jalan desa tergenang air, sekitar 10 hektar pekarangan terendam banjir, sehingga

menyebabkan berbagai aktivitas warga lumpuh total serta kerugian mencapai puluhan juta rupiah (BPBD Laporan Harian Pusdalops, 2016).

Bencana banjir yang melanda di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 tersebut berdampak besar terhadap daerah sekitarnya. Bencana banjir di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan tahun 2017 merupakan salah satu bencana Nasional yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kabupaten Pacitan pada tahun 2017, akibat dari bencana banjir di Pacitan menyebabkan beberapa daerah terendam banjir dan berdampak pada korban jiwa, kerusakan serta kerugian pada infrastruktur, lahan pertanian, serta pemukiman warga sehingga aktivitas perekonomian setempat lumpuh total.

Tabel 3 Dampak bencana banjir di Pacitan pada tahun 2017

Kecamatan Pacitan	Kecamatan Kebon Agung	Kecamatan Arjosari	Dampak keseluruhan
Desa Sirnobojo	Desa Purworejo	Desa Pagutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 korban jiwa,</li> <li>• Kerugian materil 1.709 rumah,</li> <li>• Sepanjang 23.130 meter jalan mengalami kerusakan</li> <li>• Jalan lintas selatan lumpuh total,</li> <li>• 820 meter tanggul rusak,</li> <li>• 86 meter jembatan rusak,</li> <li>• 17 unit fasilitas pendidikan rusak,</li> <li>• Puluhan hektar lahan pertanian rusak gagal panen.</li> </ul>
Desa Sukoharjo	Desa Banjarjo	Desa Jatimalang	
Desa Kayen	Desa Kebon Agung	Desa Arjosari	
Desa Kembang			
Desa Ploso			
Desa Ajowinangun			
Desa Sidoharjo			
Desa Nanggungan			
Desa Tanjungsari			

Sumber : Pacitannews, 2017.

Berdasarkan dari data tahun 2016 dan 2017 tersebut maka desa Sironoboyo setiap tahun selalu mengalami bencana banjir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Akibat dari kejadian serta dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut maka pemerintah melalui BPBD Kabupaten Pacitan pada memberikan program pengelolaan bencana kepada desa Sironoboyo yaitu melalui Program Desa Tangguh Bencana yang diatur dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang menyebutkan definisi Desa Tangguh Bencana adalah

Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana tersebut diwujudkan dalam sebuah peraturan desa yang mengandung berbagai upaya-upaya seperti pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Sehingga dengan adanya program desa tangguh bencana tersebut maka diharapkan bencana yang merugikan akan dikurangi dampaknya serta dapat menjadikan bencana banjir



yang menimpa masyarakat tersebut sebagai media untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, kesetiakawanan, kekeluargaan pada masyarakat Desa Sirnobojo.

Adanya Program Desa Tangguh Bencana pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran utama dalam mencapai tujuan sesuai dengan adanya program tersebut. Pemerintah memiliki peran yang penting terkait dengan pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana supaya masyarakat memahami secara menyeluruh dari program tersebut, karena pada dasarnya Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengurangan resiko berbasis masyarakat merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana, meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi resiko bencana di wilayah rawan bencana, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menjamin keberlanjutan yang merupakan tujuan program Desa Tangguh Bencana.

Program Desa Tangguh Bencana tersebut memiliki 6 komponen yang diatur dalam Perka BNPB No 1 tahun 2012. Komponen tersebut antara lain yaitu Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, Pengembangan Kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Komponen tersebut digunakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa sumberdaya dan organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah berjalan secara efektif. Semua

komponen harus berjalan secara optimal. Sehingga komponen yang ada pada Program Desa Tangguh Bencana tersebut harus dikoordinasikan untuk menghasilkan upaya yang terbaik.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan adanya Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Kabupaten Pacitan. Sehingga dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Desatana) Untuk Penanggulangan Banjir” (Studi Pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan).** Tujuan melakukan evaluasi terhadap Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan adalah untuk mengetahui kegiatan serta hasil dari program tersebut yang berkaitan dengan komponen Desa Tangguh Bencana yang diatur dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana evaluasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulanagan banjir pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait dengan proses pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir pada Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan.

### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut :

1. Kontribusi Penelitian
  - a) Bagi Mahasiswa
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan terkait untuk mengevaluasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b) Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka menambah wawasan terkait dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah sebagai bahan untuk mengevaluasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas serta memperkenalkan lebih dalam terkait dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara garis besar deskripsi dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat sistematika penulisan skripsi ini yang merupakan keseluruhan isi skripsi secara singkat yang disajikan dalam lima bab dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah dan

merupakan kajian yang akan dibahas dan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi. Konsep-konsep, pendapat-pendapat atau teori yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini akan membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data sebagai tahapan selanjutnya dalam penelitian. Metode penelitian akan dibahas dalam bab ini untuk mendapatkan hasil akhir penelitian.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian terkait dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, serta analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dibandingkan dengan teori terkait.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan evaluasi program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Evaluasi Program

##### 1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi secara etimologi adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan, penentuan nilai. Menurut Suharto (2015:119) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus-menerus dan evaluasi akhir. Selaian itu menurut Wirawan (2011:7) mengatakan pengertian evaluasi adalah

evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Scriven (Tayibnapi, 2008:21) membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif sebagai fungsi evaluasi yang utama. Fungsi dari evaluasi formatif yaitu evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan seperti program, produk, dan sebagainya. Sedangkan fungsi evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Worthen dan Sander (Arikunto dan Jabar, 2009:2) menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi bermafaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Mutrofin (2010:33-36) evaluasi akan menjadi satu kegiatan sistematis yang dilaksanakan untuk membantu supaya dapat mempertimbangkan dan meningkatkan nilai suatu program atau kegiatan. Definisi tersebut mencakup 4 dimensi kunci evaluasi yaitu :

a. Evaluasi melibatkan pertimbangan nilai

Evaluasi memerlukan pertimbangan nilai mengenai suatu program. Hal ini merupakan suatu tujuan dan karakteristik yang dapat membedakan dari semua evaluasi. Ketepatan suatu keputusan ditentukan oleh kecukupan landasan yang terdiri dari bukti, keyakinan, interpretasi yang dianggap relevan.

b. Evaluasi berbeda dengan riset

Evaluasi dan riset, keduanya merupakan bentuk penyelidikan sistematis, sama-sama memiliki teknik, metode, dan prosedur. Perbedaan yang paling penting adalah terletak pada tujuan yang akan dilayani oleh keduanya. Perbedaan tersebut mengenai fokus penyelidikan, kemampuan generalisasi hasilnya, peranan penilaian.

c. Beberapa kontribusi evaluasi pada upaya pengambilan keputusan

Tujuan yang menyangkut penilaian suatu program atau kegiatan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan supaya dapat memilih diantara berbagai alternatif kebijakan. Pengambilan keputusan mencakup lebih dari sekedar para perencana dan administrator, namun juga mencakup kelompok lain yang terpengaruh oleh keberadaan suatu program.

- d. Evaluasi merupakan kegiatan praktis mendorong ke arah tindakan

Evaluasi dalam hal ini merupakan argumen yang mendorong ke arah tindakan daripada ke arah pengetahuan baru. Evaluasi dalam hal ini adalah argumen yang mendorong ke arah berbagai kesimpulan dalam suatu program.

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai definisi mengenai evaluasi dengan formulasi berbeda, akan tetapi pada inti isinya sama. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui berkaitan dengan tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi merupakan suatu tindakan untuk menganalisis, menilai, mengenai objek atau program yang akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program tersebut.

## 2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012:22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e. Pengembangan staf program.
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang.
- g. Akreditasi program.
- h. Mengukur *cost effectifenis* dan *cost efficiency*.
- i. Mengambil keputusan mengenai program.
- j. Akuntabilias.

- k. Memberikan umpan balik kepada pimpinan dan program.
- l. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Arikunto (2002:13), ada 2 tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Sedangkan menurut Crawford (2000:30), tujuan evaluasi adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- 2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- 3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- 4) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan atau membuat keputusan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis yang diarahkan kepada program secara keseluruhan, serta difokuskan pada masing-masing komponen. Sehingga evaluasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam melihat tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu keputusan yang sudah diambil tersebut.

### **3. Pengertian Program**

Pengertian program secara umum adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Ada beberapa pengertian tentang program itu sendiri, yaitu program adalah rencana, dan program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama.

Menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) ada dua pengertian untuk istilah program yaitu program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti

umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sehingga yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

#### **4. Pengertian Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Secara umum alasan dilaksanakannya evaluasi program yaitu pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, mengukur efektivitas dan efesiensi program, mengukur pengaruh, efek sampingan program, akuntabilitas pelaksanaan program, akreditasi program, alat yang digunakan mengontrol pelaksanaan

program, alat komunikasi dengan stakeholder program, keputusan mengenai program yaitu diteruskan, dilaksanakan di tempat lain, dirubah, dan dihentikan.

Menurut Tyler, 1950 (Arikunto dan Jabar, 2009:5), evaluasi program merupakan suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi. Dalam melakukan evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan serta metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat. Sedangkan menurut Widoyoko (2012:9) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektifitas dari masing-masing komponennya baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu.

Pendapat lain menurut Cronbach & Stufflebeam, (Suprijono, 2011:25) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Adapun hubungan antara evaluasi program dengan kebijakan adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambil keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program



itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Menurut Arikunto dan Jabar (2009:22) ada 4 hal yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu :

- a) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b) Merevisi program, karena ada bagian yang kurang sesuai dengan harapan.
- c) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d) Menyebarluaskan program, melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program dilain waktu, karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi. Model evaluasi yang satu dengan lainnya tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan program yang dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.

## **5. Tujuan Evaluasi Program**

Evaluasi program dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya serta untuk menyediakan data dan informasi maupun rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan apakah akan

melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. Program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Tanpa adanya evaluasi, maka program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Seperti yang dijelaskan Sudjana (2006:48) tujuan evaluasi program terdapat 5 hal, yaitu :

- a) Memberikan masukan bagi perencanaan program,
- b) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program,
- c) Memberi masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program,
- d) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program,
- e) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Pendapat lain menurut Wirawan (2011:22) terdapat beberapa tujuan evaluasi program yaitu antara lain :

- a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Dalam hal ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. Program juga diadakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang dilayani.
- b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Evaluasi program ini bertujuan menentukan posisi pelaksanaan program apakah berada pada posisi yang tepat atau tidak.

- c) Mengukur terkait apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, mengukur apakah semua standar tersebut dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut.
- d) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e) Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata hasil program buruk dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.
- f) Akuntabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana program. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar atau tolok ukur keberhasilan atau tidak.

Selain itu menurut Mulyatiningsih, (2011:114-115) tujuan adanya dilakukan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil dari evaluasi ini sangat penting untuk mengembangkan program yang sama pada tempat lain.
- b) Mengambil keputusan terkait keberlanjutan sebuah program, apakah dari program tersebut perlu untuk diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tersebut bahwa evaluasi program sangat diperlukan karena dengan adanya evaluasi program tersebut maka dapat mengetahui terkait berhasil atau tidaknya suatu program tersebut. Evaluasi program dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Sehingga setiap program yang ada memerlukan suatu evaluasi.

## 6. Evaluasi CIPP

Pada dasarnya dalam melakukan penilaian atau evaluasi program, ada banyak model yang dapat digunakan. Pada penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan satu model evaluasi yaitu model Evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP), sebagai acuan dalam menilai komponen-komponen program kebencanaan pada Desa Tangguh Bencana. Model evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) mulai dikembangkan oleh (Daniel Stufflebeam) pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Zhang (2017:23) dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi ini berangkat dari pemahaman pengambilan keputusan yaitu mengenai keputusan apa yang diambil, oleh siapa dilakukan, kapan dilakukan, serta data apa saja yang dapat dijadikan alternatif pengambilan keputusan. Pada penelitian ini model evaluasi program yang digunakan yaitu *CIPP Evaluation Model*. Model evaluasi program CIPP terdiri dari empat jenis kegiatan evaluasi yaitu evaluasi *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses),

dan *product* (produk). Menurut Stufflebeam dan Zhang dalam bukunya *The CIPP Evaluation Model* (2017: 23) menjelaskan empat kegiatan model evaluasi CIPP sebagai berikut:

- 1) Evaluasi konteks (*context evaluation*) adalah upaya untuk menggambarkan dan memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Menurut Mutrofin, (2010:91) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi berbagai isu, kesempatan, dan kendala yang ada di dalam lingkungan program.
- 2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Mutrofin, (2010:91) evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan. evaluasi ini mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, anggaran dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.
- 3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), Menurut Mutrofin, (2010:91) evaluasi Proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah program sedang dilaksanakan. Secara berkala mewawancarai penerima manfaat, pemimpin program, dan staf untuk dapat menilai terhadap

program tersebut. Gunakan temuan evaluasi proses untuk membantu mempertahankan catatan dan menyusun laporan tertulis mengenai temuan evaluasi proses. Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

- 4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*), Menurut Mutrofin, (2010:92) evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan apakah program sukses. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan dalam upaya mencapai kebutuhan yang ditargetkan.

Keunggulan Model Evaluasi CIPP Mutrofin, (2010:91) adalah :

- 1) CIPP memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas mulai dari konteksnya hingga proses implementasi.
- 2) CIPP memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan dan memberikan informasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu melalui model evaluasi CIPP penulis lebih mudah memahami dan menilai komponen program kebencanaan tersebut. Berikut adalah kerangka pemikiran evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi CIPP:



Gambar 1 Kerangka pikir evaluasi program



Sumber : Peneliti, 2017

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka penulis akan menjelaskan terkait dengan kerangka pikir tersebut. Pada evaluasi konteks penulis akan menjelaskan terkait dengan kondisi desa Sirnobojo yang rawan banjir tersebut. Tahap ini merupakan tahap awal sehingga penuliss fokus terhadap legislasi.

Pada evaluasi masukan penulis fokus terhadap perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas. Tahap perencanaan tersebut merupakan penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas. Pada komponen kelembagaan menjelaskan terkait pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok atau tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Pada tahap pendanaan yang dimaksud adalah rencana mobilisasi dana dan sumber dana. Sedangkan pada pengembangan kapasitas dimaksudkan adalah dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pada tahap evaluasi proses penulis akan fokus dan memaparkan terkait dengan penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana (Destana) di desa Sirnobojo yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan oleh BPBD Kabupaten Pacitan dalam

mengkaji resiko bencana, serta pelatihan yang dilakukan terkait dengan manajemen bencana.

Pada tahap evaluasi hasil yaitu merupakan tahap terakhir. Dalam hal ini penulis akan memaparkan secara menyeluruh terkait dengan komponen pada desa tangguh bencana pada desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan apakah program desa tangguh bencana tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **B. Bencana**

### **1. Pengertian Bencana**

*Webster New World Dictionary* (Kodoatie, 2006:67) pengertian bencana dari berbagai kamus bencana, bahwa bencana merupakan suatu kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan besar dan kemalangan serius yang terjadi secara tiba-tiba. Bencana merupakan suatu kecelakaan yang sangat buruk terutama yang menyebabkan banyak orang meninggal. Menurut Carter (Kodoatie, 2006: 67) bencana merupakan suatu kejadian alam atau buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan dampak yang hebat sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tersebut harus merespon dengan tindakan-tindakan yang luar biasa. Priambodo (2013:22), bencana merupakan suatu kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup.

Pendapat lain menurut Hadi & Sugiantoro (2009:9), bencana adalah situasi yang kedatangannya tidak terduga oleh kita sebelumnya, dimana dalam kondisi itu bisa terjadi kerusakan, kematian bagi manusia atau benda-benda maupun

rumah serta segala perabot yang kita miliki dan tidak menutup kemungkinan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk mati. Bencana dapat terjadi melalui suatu proses yang panjang atau situasi tertentu dalam waktu yang sangat cepat tanpa adanya tanda-tanda. Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga kerusakan infrastruktur lingkungan.

Definisi lain menurut *International Strategy for Disaster Reduction UNISDR* (Nurjanah, 2013:10) bencana adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumbernya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 1 pengertian bencana adalah

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bencana alam merupakan suatu kejadian yang berdampak pada kerusakan serta kerugian yang ditimbulkan oleh alam sehingga mengakibatkan gangguan yang merugikan pada manusia dan alam bahkan memakan korban jiwa, luka berat dan putusnya akses kehidupan.

## 2. Penyebab Bencana

Pada dasarnya penyebab timbulnya bencana terdapat dari berbagai aspek. Dalam hal ini penyebab bencana dapat dibagi menjadi 2 menurut Kodoatie & Sjarif, (2010:68) antara lain :

### 1) Faktor Alam

Secara alami bencana selalu terjadi di muka bumi, misal tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda langit ke bumi, tidak adanya hujan pada suatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan kekeringan atau sebaliknya menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

### 2) Faktor Manusia

Bencana oleh aktifitas manusia terutama akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Eksploitasi ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan ini mengakibatkan kebutuhan pokok dan kebutuhan tidak pokok meningkat, kebutuhan infrastruktur meningkat, alih atau guna lahan meningkat.

Sementara itu, faktor penyebab bencana yang lain berdasarkan pendapat yang dikemukakan menurut Ramli, (2010:10) menyebutkan bahwa penyebab bencana antara lain adalah :

### 1) Faktor Alam

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor

alam, hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.

## 2) Perbuatan Manusia

Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan atau lahan yang disebabkan ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan pertambangan.

## 3) Sosial

Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan sosial antara anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku, atau ketimpangan sosial.

## 3. Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia pada umumnya terdapat beberapa jenis bencana. Namun dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan jenis-jenis bencana antara lain :

- 1) Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan.
- 2) Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.



- 3) Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- 4) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- 5) Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
- 6) Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
- 7) Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian dan sedang dibudidayakan.
- 8) Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan kerugian.
- 9) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- 10) Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar dengan kecepatan 40-50 km/jam

hingga menyentuh permukaan bumi sehingga akan hilang dalam waktu yang singkat (3-5 menit).

- 11) Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam.
- 12) Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai.
- 13) Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
- 14) Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
- 15) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
- 16) Konflik Sosial atau kerusuhan sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras.

17) Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

18) Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, dan penghancuran. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

#### **4. Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana atau pengelolaan bencana merupakan suatu aktifitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dalam mengendalikan atau mengelola kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan, organisasi, kepemimpinan, pengendalian sampai tahap evaluasi dan monitoring (Kodoatie dan Sjarief, 2006:69). Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Siklus pengelolaan bencana meliputi jauh sebelum bencana, pra bencana, menjelang bencana, saat bencana dan paca bencana. Jauh sebelum bencana merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan paska terjadinya bencana

yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan pengembangan pengelolaan bencana (Kodoatie dan Sjarief, 2006:137) .

UNESCO (Kodoatie dan Sjarief, 2006:138) secara umum bahwa kegiatan manajemen bencana diawali dari pengelolaan jauh sebelum terjadinya bencana, *pra* bencana, saat bencana dan pasca bencana. *Pra* Bencana sampai menjelang bencana merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau *preventive action* terjadinya efek yang fatal yang ditimbulkan jika bencana terjadi atau akan terjadi. Kegiatan *pra* bencana ini meliputi kegiatan preventif atau suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya efek atau dampak yang buruk dari bencana. Mitigasi, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mereduksi dampak bencana ke komunitas yaitu, jiwa, harta benda maupun dampak ke infrastruktur. Kegiatan yang terkait dalam proses *pra* bencana adalah persiapan dan kesiagaan, merupakan suatu aktifitas yang membuat pemerintah, organisasi, masyarakat, dan perorangan dapat merespon bencana yang terjadi secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan benar. Menurut Wikipedia (Nurjanah, 2013:45) penanggulangan bencana adalah proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur resiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 3 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan

hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi, dan non proselitisi.

Pada dasarnya penanggulangan bencana juga memiliki suatu tujuan. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tujuan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- 2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan
- 3) melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya
- 4) mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
- 5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- 6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan
- 7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial, bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penanggulangan bencana merupakan kegiatan merupakan suatu aktifitas yang terus menerus diawali dari pengelolaan jauh sebelum terjadinya bencana, pra bencana, saat bencana dan

pasca bencana yang berusaha mengatur resiko untuk menghindari ataupun memperbaiki dampak dari suatu bencana yang terjadi.

### **C. Desa Tangguh Bencana**

#### **1. Pengertian Desa Tangguh Bencana**

Desa tangguh bencana merupakan suatu program dari Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengacu pada Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012, desa tangguh bencana merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman yang terjadi di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Desa tangguh bencana diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

Komponen-komponen desa tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 antara lain :

##### **1) Legislasi**

Merupakan kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.



## 2) Perencanaan

Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas.

## 3) Kelembagaan

Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.

## 4) Pendanaan

Rencana mobilisasi dana dan sumber daya dari APBD kabupaten atau kota, APBDes atau ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan.

## 5) Pengembangan kapasitas

Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

## 6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan

resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Prinsip-Prinsip pelaksanaan program desa tangguh bencana menurut Perka BNPB No.1 tahun 2012 antara lain:

1) Bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Bencana alam merupakan kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimpa semua orang, sehingga bencana alam merupakan tanggung jawab semua manusia.

2) Berbasis pengurangan risiko.

Pengembangan program desa tangguh bencana yang dilaksanakan harus berdasarkan hasil analisis risiko dan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi risiko dampak bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.

3) Pemenuhan hak masyarakat.

Penyelenggaraan program pengembangan desa tangguh bencana merupakan bentuk dari pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Masyarakat memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara antara lain: hak atas perlindungan, Mrakarsa pengurangan resiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset baik modal material maupun modal sosial termasuk kearifan

budaya lokal masyarakat. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan yang digunakan.

4) Pembelajaran bersifat inklusif

Program pengembangan desa tangguh bencana dilakukan dengan menggunakan prinsip yang melibatkan seluruh komponen, dengan mengakomodasi sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang didasari pada solidaritas dan kerelawanan.

5) Berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender.

Program pengembangan desa tangguh bencana merupakan upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dengan memerhatikan perbedaan yang ada dimasyarakat dipandang sebagai suatu kekuatan. Program desa tangguh bencana akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

6) Keberpihakan kepada kelompok rentan

Program pengembangan desa tangguh mengutamakan kelompok masyarakat yang dianggap rentan, kelompok rentan tersebut meliputi anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan

orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis, kelompok rentan juga meliputi warga miskin dan warga yang secara sosial tidak mendapatkan keuntungan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.

7) Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

8) Kemitraan

Program mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Prinsip ini menjadi sangat penting karena resiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

9) Multi ancaman

Kegiatan pengurangan resiko bencana harus mempertimbangkan potensi resiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa atau kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

#### 10) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan

Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

- 11) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan resiko bencana seperti analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi. Pengurangan resiko bencana seharusnya

mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada semua tingkatan, mulai dari tingkat desa sampai negara. Analisis resiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

12) Diselenggarakan secara lintas sektor.

Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarus utamaan pengurangan resiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja pengurangan resiko bencana dalam mewujudkan Desa atau Kelurahan tangguh bencana. Sinergi kerja lintas sektor dapat menghindari tumpang tindih kegiatan yang dapat berakibat pada pendanaan yang tidak efisien.

Secara keseluruhan berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012, Desa Tangguh Bencana dikategorikan menjadi 3 macam yaitu Desa Tangguh Bencana Pratama, Madya dan Utama, yang masing-masing dicirikan sebagai berikut :

1) Desa Tangguh Bencana Pratama

Pada tahap desa tangguh bencana pratama menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), desa tangguh bencana pratama ini di cirikan dengan, terdapat upaya-upaya awal di masyarakat untuk menyusun kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ditingkat Desa atau Kelurahan. Masyarakat mempunyai upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen Pengurangan Risiko Bencana, selain itu desa tangguh bencana tingkat pratama ini juga dicirikan dengan adanya upaya-upaya dari masyarakat membentuk forum Pengurangan Risiko Bencana yang



beranggotakan wakil-wakil mereka, adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan Pengurangan Risiko Bencana Desa atau kelurahan. Desa tangguh bencana pratama juga ditandai dengan adanya upaya-upaya awal masyarakat untuk melakukan pengkajian risiko, manajemen risiko pengurangan kerentanan dan adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta sikap tanggap bencana.

## 2) Desa Tangguh Bencana Madya

Desa tangguh bencana madya dicirikan dengan adanya suatu kebijakan Pengurangan Risiko Bencana ditengah masyarakat yang dikembangkan, adanya perencanaan penanggulangan bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu, sudah terdapat Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan perwakilan masyarakat termasuk perwakilan dari perempuan namun juga belum berjalan secara optimal. Ciri lainnya terdapat tim relawan penanggulangan bencana yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat tetapi belum rutin dilakukan. Adanya upaya-upaya pengkajian resiko, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sebagai alternatif untuk mengurangi kerentanan, namun belum teruji. Desa tangguh bencana madya juga dicirikan dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan belum sistematis.

### 3) Desa Tangguh Bencana Utama

Desa tangguh bencana utama mempunyai ciri, memiliki kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk Peraturandes. Terdapat perencanaan penganggulangan bencana yang telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan di rinci dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adanya forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat yang didalamnya mencakup kelompok perempuan dan kelompok rentan yang sudah berfungsi secara aktif. Adanya tim relawan penanggulangan bencana yang secara rutin terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat. Selain itu ciri desa tangguh bencana utama juga dicirikan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat secara sistematis untuk mengadakan pengkajian resiko, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

## 2. Tujuan Desa Tangguh Bencana

Pada dasarnya setiap warga negara atau masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan negara atas perlindungan dan rasa aman. Dalam konteks kebencanaan, upaya penanggulangan bencana menjadi perwujudan dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan dan rasa aman masyarakat. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Penanggulangan

Bencana No 24 Tahun 2007. Meski demikian, masyarakat juga wajib mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki yang didukung dengan komitmen semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana. Pengerahan sumber daya tersebut salahsatunya diwujudkan dalam sebuah kelompok atau organisasi yang terlibat aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, dimana komunitas sebagai pelaku utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko bencana dengan melakukan analisis, identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan adanya program desa tangguh bencana menurut Perka BNPB No 1 tahun 2012 adalah :

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bahaya dari dampak yang merugikan akibat bencana.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana.
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana.
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana antara lain: pihak daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Kemampuan mengelola risikonya menjadi tujuan karena masyarakat sebagai pelaku utama mewujudkan ketahanan atau ketangguhan terhadap bencana. Definisi umum menurut Twigg, (2009:8) menjelaskan bahwa ketahanan atau ketangguhan adalah komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengurangi dan menyerap tekanan atau kekuatan yang potensial melalui adaptasi atau perlawanan, mengelola atau mempertahankan fungsi dasar dan struktur tertentu selama terjadi bencana, memulihkan atau bangkit kembali setelah terjadi bencana. Untuk mencapai ketangguhan, individu, komunitas, atau institusi sosial yang terkena dampak bencana harus sadar untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya. Dengan demikian maka pada desa tangguh bencana harus menghasilkan masyarakat yang tangguh bencana. Dari hal tersebut menurut Geis DE (Twigg, 2009:8-9) pengertian masyarakat tangguh bencana adalah

sesuatu yang lebih bersifat cita-cita. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya aman dari bahaya alam ataupun bahaya-bahaya terkait kegiatan manusia. Mungkin dapat membantu bila kita membayangkan suatu masyarakat yang tahan bencana atau tangguh terhadap bencana sebagai 'sebuah masyarakat dengan tingkat keamanan tertinggi yang kita ketahui memiliki kemampuan merancang dan membangun dalam lingkungan yang mengandung risiko bahaya alam, yang meminimalkan kerentanannya dengan memaksimalkan penerapan langkah-langkah Pengurangan Resiko Bencana. Dengan demikian Pengurangan Resiko Bencana merupakan gabungan aksi-aksi, atau proses, yang dilaksanakan dalam rangka mencapai ketahanan.

Komunitas atau masyarakat yang tangguh bencana memiliki adaptasi terhadap bahaya yang menekankan pada kemampuan komunitas untuk mempergunakan kemampuan personal dan sumber daya sosial untuk mengelola kebutuhan, tantangan dan merubah kenyataan. Ketahanan berarti memberikan penekanan yang lebih besar pada apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi diri mereka sendiri dan pada cara-cara untuk memperkuat kapasitas mereka, memusatkan

perhatian pada kerentanan terhadap bencana atau kebutuhan dalam situasi darurat. Dikutip dari jurnal *Building Community Resilience Conceptual Framework and its Application in Post Tsunami Resettlement* menjelaskan bahwa pengertian ketahanan menurut Godschalk, 2003 (Danar dan Pushpalal, 2014) ketahanan dibagi menjadi dua hal penting yaitu sistem fisik dan komunitas manusia terutama yang berada di daerah kota. Sistem fisik adalah komponen lingkungan yang dibangun dan alami dari sebuah kota. Seperti jalan, bangunan, infrastruktur, komunikasi, dan fasilitas pembangkit listrik, serta saluran air, tanah, topografi, geologi, dan sistem alam lainnya, sementara komunitas manusia adalah komponen sosial dan kelembagaan kota seperti sekolah, lingkungan, lembaga, organisasi, perusahaan, gugus tugas, dan sejenisnya. Kerangka akademisi menekankan pentingnya sistem ketahanan secara keseluruhan dan komprehensif yang menyangkut hubungan dalam sistem seperti kemampuan dan kapasitas, perspektif fisik dan manusia dan pertimbangan ekologis sosial.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan adanya program desa tangguh bencana tersebut dapat menjadikan masyarakat komunitas yang tangguh dan memiliki ketahanan atau kemampuan secara keseluruhan dalam mengelola, mengurangi akibat bencana yang dapat memapar dirinya karena memiliki keseimbangan yang baru untuk memulihkan fungsi-fungsi dan struktur menggunakan sumberdayanya sendiri secara bijaksana, serta memastikan fungsi dan struktur tersebut tetap berlanjut untuk penghidupan mereka dan mendorong komunitas untuk mengelola risiko di tingkat lokal dengan memaksimalkan berbagai sumber daya.

## **D. Banjir**

### **1. Pengertian Banjir**

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Menurut Yulaelawati dan Syihab (2008:6) banjir merupakan meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya.

Nurjanah (2013:24) pengertian banjir merupakan limpasan air normal yang meluap dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan penampungan banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Definisi lain Menurut Suprawoto (2008:29) banjir adalah meluapnya air dari saluran dan menggenangi kawasan sekitarnya. Sembilan puluh persen dari kejadian bencana alam berhubungan dengan banjir. Ada dua jenis banjir, yaitu banjir bandang kiriman dan banjir pasang-surut. Berdasarkan beberapa pengertian



banjir diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa banjir adalah naiknya permukaan air akibat hujan yang terus-menerus yang disebabkan oleh tingginya permukaan volume sungai dan menimbulkan kerugian.

## **2. Faktor Penyebab Banjir**

Penyebab timbulnya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor. Menurut Yulaelawati & Syihab, (2008:8-9) faktor penyebab timbulnya banjir adalah :

- 1) Pengaruh aktivitas manusia, seperti:
  - a) Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk pemukiman maupun digunakan untuk industri.
  - b) Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan.
  - c) Permukiman di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik.
  - d) Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air, terutama di perumahan-perumahan.
- 2) Kondisi alam yang bersifat tetap seperti:
  - a) Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai.
  - b) Kondisi topografi yang cekung, yang merupakan dataran banjir.
  - c) Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai yang datar, berkelok-kelok, timbulnya sumbatan, dan adanya sedimentasi sungai membentuk sebuah pulau.

- 3) Peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti:
  - a) Curah hujan yang tinggi.
  - b) Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.
  - c) Penurunan muka tanah atau amblesan.
  - d) Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi.

### 3. Jenis Banjir

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jenis banjir yang umumnya terjadi. Ke tiga jenis tersebut menurut Yulaelawati & Syihab, (2008:6) adalah:

#### 1) Banjir bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah hujan berintensitas tinggi dengan jangka waktu pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat.

#### 2) Banjir sungai

Banjir sungai biasanya disebabkan oleh curah hujan yang terjadi di daerah aliran sungai secara luas dan berlangsung lama. Selanjutnya air sungai yang ada meluap dan menimbulkan banjir yang menggenangi daerah di sekitarnya.

#### 3) Banjir pantai

Banjir ini berkaitan dengan adanya badai siklon tropis dan pasang surut air laut. Banjir besar yang terjadi dari hujan sering diperburuk oleh gelombang badai yang diakibatkan oleh angin terjadi di sepanjang pantai.

#### 4. Dampak banjir

Banjir tentunya membawa dampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini menurut Mistra, (2007:19) mengatakan bahwa dampak banjir akan terjadi pada beberapa aspek dengan tingkat kerusakan berat pada aspek-aspek berikut ini:

- 1) Aspek Penduduk, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan penduduk terisolasi.
- 2) Aspek Pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan,perlengkapan kantor dan terganggunya jalannya pemerintahan.
- 3) Aspek Ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian,tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan, hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.
- 4) Aspek Sarana Prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.
- 5) Aspek Lingkungan, antara lain berupa kerusakan ekosistem, obyek wisata, persawahan atau lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan tanggul atau jaringan irigasi.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Untuk Penanggulangan Banjir Studi Pada Desa Sironoyo Kabupaten Pacitan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:205) metode penelitian kualitatif adalah masalah yang akan dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berganti setelah peneliti berada di lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Data yang dikumpulkan melalui penelitian deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka dengan semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kata kunci terhadap yang sudah diteliti. Proses didalam ini sangat penting daripada hasil, karena hubungan yang akan diteliti menjadi jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

##### **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Dalam penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi berbagai aspek yaitu tempat,

pelaku dan aktivitas. Luasnya masalah dalam penelitian kualitatif, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini maka fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian adalah:

- 1) Proses pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) berdasarkan 6 komponen pada Desa Tangguh Bencana yang diatur dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 antara lain :
  - a) Legislasi : kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
  - b) Perencanaan : penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat desa yang meliputi rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan rencana aksi pengurangan risiko bencana komunitas.
  - c) Kelembagaan : pembentukan forum penanggulangan bencana desa.
  - d) Pendanaan : berkaitan dengan sumber pendanaan.
  - e) Pengembangan kapasitas : berkaitan dengan pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
  - f) Penyelenggaraan : mengkaji terkait dengan penyelenggaraan program yang sudah dilaksanakan.
- 2) Fokus terhadap evaluasi program yaitu CIPP yang berkaitan dengan 6 komponen pada desa tangguh bencana antara lain legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan. Dalam hal ini CIPP tersebut menyangkut pada :

- a) *Context*, mengidentifikasi dan menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program desa tangguh bencana tersebut.
- b) *Input*, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan komponen pada desa tangguh bencana yaitu pada perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas.
- c) *Process*, menilai pelaksanaan dari program desa tangguh bencana dan menginterpretasikan manfaat yang berkaitan dengan komponen desa tangguh bencana dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d) *Product*, menyimpulkan apakah program desa tangguh bencana tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.

### **C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap penting pada penelitian kualitatif. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini maka objek serta tujuan sudah ditetapkan sehingga mampu mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa terdapat di wilayah tertentu atau suatu lembaga instansi tertentu untuk memperoleh data primer. Sehingga dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

Sedangkan yang dimaksud situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melihat keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data maupun informasi yang diperlukan. Maka penetapan situs



penelitian adalah di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan. Alasan penulis memilih Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan adalah berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan tersebut merupakan bencana Nasional yang terjadi di Indonesia. Sehingga dengan adanya penelitian ini maka akan menghasilkan data maupun informasi baru terkait bencana yang terjadi di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data memiliki peran yang penting dalam penelitian. Dengan demikian maka, peneliti menentukan siapa saja serta apa saja data yang harus didapatkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Moleong (Arikunto, 2010:22) sumber data penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Pada penelitian kualitatif, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1) Data primer**

Data primer merupakan data dalam bentuk verbal maupun kata-kata yang diucapkan baik secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya untuk memperoleh data ataupun informasi.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film,

rekaman video, dan yang lain-lain dan berfungsi untuk memperkaya pada data primer.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2015:224).

#### **1) Observasi**

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dengan mengamati fenomena untuk mendapatkan informasi yang mampu menunjang dalam memperoleh data. Menurut Herdiansyah, (2010:131) observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

Penelitian ini, objek yang di observasi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dan desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan. Pada observasi ini dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dalam waktu 1 bulan, dengan durasi kurang lebih 1-2 jam per observasi. Dalam melaksanakan

observasi, alat bantu yang digunakan adalah *notebook* yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang dapat menunjang dalam penyelesaian penelitian ini, serta *handphone* (HP) untuk menunjang kegiatan observasi.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat memperoleh makna pada suatu topik tertentu Esterberg, 2002 (Sugiyono, 2015:231). Selain itu menurut Moleong, 2005 (Herdiansyah, 2010:18) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan. Selain itu wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian yang ada dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Wawancara penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti akan mengumpulkan data-data primer dengan sejumlah informan seperti pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Kader desa tangguh bencana, Kepala desa Sirnobojo, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana, serta masyarakat desa Sirnobojo sesuai dengan rincian berikut :

Tabel 4 Data Informan

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Ibu Diannitta	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pacitan
Ibu Diana	Fasilitator Desa Tangguh Bencana.
Bapak Sugiyono	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Bapak Arifin	Kepala Desa Sirnobojo.
Bapak Indar	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana.
Ibu Suratin	Kader Desa Tangguh Bencana.
Ibu Sumiati	Kader Desa Tangguh Bencana.
Ibu Imsiati	Kader Desa Tangguh Bencana.
Ibu Sulis	Kader Desa Tangguh Bencana
Ibu Sulastri	Warga Desa Sirnobojo.
Saudari Desy	Karang Taruna Desa Sirnobojo.
Ibu Sri	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Tini	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Prapti	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Dian	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Tya	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Tri Andhika	Warga Desa Sirnobojo.
Ibu Fera	Warga Desa Sirnobojo.
Bapak Pendi	Warga Desa Sirnobojo.
Bapak Slamet	Warga Desa Sirnobojo.
Bapak Anjar	Warga Desa Sirnobojo.
Bapak Safindra	Warga Desa Sirnobojo.
Bapak Khoiri	Kepala Dusun Krajan Desa Sirnobojo.
Bapak Tomy	Warga Desa Sirnobojo.

*Sumber : Peneliti, 2018.*

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2015:240).

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan alat penunjang. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour questions* yaitu peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan serta direkam. Selanjutnya yaitu tahap *focused and selectio* yaitu melakukan pengumpulan data dengan menguraikan fokus dan menganalisis untuk membuat sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2015:223).

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2015:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diformulasikan kepada orang lain. Herdiansyah (2010:158) menjelaskan analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting karena hasil

penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis data dengan metode perbandingan tetap atau *constant comparative method* yang dikemukakan oleh Gleser & Straus. Metode perbandingan tetap atau *constant comparative method* menurut Gleser & Straus (Moleong, 2014:287) adalah analisis data yang membandingkan satu dengan yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Tahap analisis data dalam metode *grounded research* ini dilakukan dalam bentuk pengkodean. Tujuan dilakukannya pengkodean dalam metode *grounded research* ini adalah memperoleh ketepatan dalam proses riset, menyusun suatu teori, membantu mengatasi terjadinya bias dan asumsi yang keliru, memberikan suatu landasan dan kepadatan makna, serta dapat mengembangkan pemahaman dalam menghasilkan teori baru. Hasil dari *Grounded Research* adalah suatu teori yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Laporan riset memaparkan teori yang ditunjang dengan data yang berupa diskusi naratif dari proses dan temuan riset. Dalam hal ini proses analisis datanya mencakup beberapa hal yaitu :

- 1) Reduksi data

Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi satuan atau unit yaitu unit-unit terkecil yang ditemukan dalam data yang



memiliki makna jika dikaitkan pada fokus penelitian dengan melakukan *coding* data yang berarti memberikan kode pada setiap data supaya tetap dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana. Analisis dimulai dengan pengkodean (*coding*) yaitu mencatat setiap kejadian dalam data sebanyak mungkin pada kategori analisisnya. Pada saat kategori tersebut maka data tersebut akan muncul sehingga sesuai dengan kategori yang ada. Keperluan *coding* hanya terdiri atas pencatatan kategori-kategori yang ditetapkan namun bisa juga dilakukan secara lebih teliti. Adapun prosesnya diawali dengan proses *open coding* yang merupakan bagian dari analisis data, dimana peneliti melakukan identifikasi, penamaan, kategorisasi dan penguraian gejala yang ditemukan dalam teks hasil dari wawancara, observasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri.

## 2) Kategorisasi atau Menyusun Kategori

Kategorisasi atau menyusun kategori merupakan upaya memilih setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Pada tahap ini dimulai dengan cara yang sederhana yaitu pencatatan atau coding tersebut tetap berlanjut untuk membandingkan kejadian demi kejadian menjadi suatu data dan pada selanjutnya setiap kategori diberi nama disebut label. Selama proses ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo tersebut bukan sekedar gagasan yang bersifat sementara namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset tersebut masih berlangsung.

### 3) Membatasi Lingkup Teori

Dalam tahap ini pembatasan terjadi pada dua aspek yaitu teori dan kategori. Pertama adalah menganalisis dan membandingkan kejadian berikutnya antara satu kategori dengan kategori lainnya. Modifikasi yang terjadi pada intinya membuang ciri-ciri yang tidak relevan, memperpadukan dengan detail ciri-ciri kategori ke dalam garis besar kategori yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu membatasi teori merupakan pengurangan dalam kategori yang asli sehingga analisis menjadi berkaitan. Analisis harus dimulai dengan mencatat dan mengkodekan semua kategori baru tersebut untuk melihat kategori tersebut sudah sesuai dengan teori atau tidak.

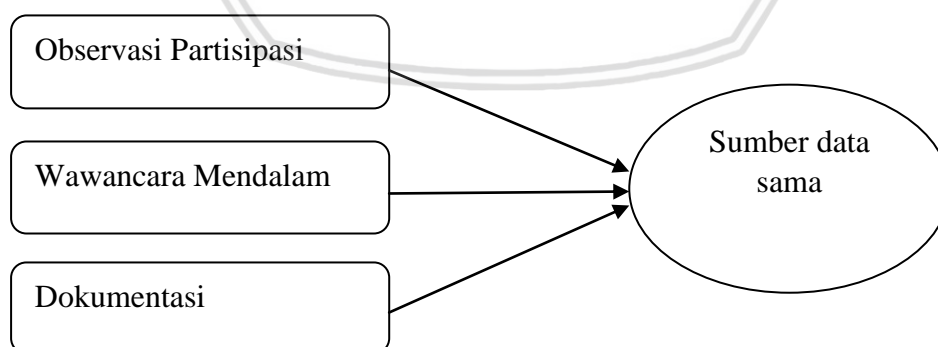
### 4) Menuliskan teori

Dalam hal ini proses analisisnya adalah dari data yang sudah di *coding* dalam serangkaian catatan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk memulai menuliskan teori maka perlu membandingkan catatan dari setiap kategori yang sudah diperoleh tersebut sebagai cara untuk mempertajam analisis dalam melakukan pengkodean maka dilakukan analisis proses dengan maksud untuk menghidupkan data melalui penggambaran dan menghubungkan tindakan atau interaksi untuk mengetahui tahapan dan rangkaian data yang digunakan. Menghubungkan tindakan atau interaksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui urutan waktu atau kronologi suatu peristiwa melainkan yang lebih penting adalah untuk menemukan hubungan antara sebab dan akibatnya.

## H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan untuk menguji hasil dari penelitian berdasarkan data yang sudah dikumpulkan selama proses penelitian untuk melihat validitas dan reabilitas data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, (2014:330) triangulasi merupakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu menurut Herdiansyah, (2010:201) triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga triangulasi teknik tersebut adalah menggunakan cara dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama (Sugiyono, 2015:242). Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Triangulasi teknik pengumpulan data sumber yang sama.



Sumber : (Sugiyono, 2015:242).

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan

data, apabila dibandingkan dengan suatu pendekatan. Mathinson, 1988 (Sugiyono, 2015:241) nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi program desa tangguh bencana (Destana) untuk penanggulangan banjir studi pada desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir adalah :
  - a) Melakukan pendekatan-pendekatan alternatif kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap penanggulangan bencana banjir melalui pembuatan stiker peta rawan bencana. Selain itu melakukan penyebaran informasi sejak awal dibentuknya desa tangguh bencana pada tahun 2012 hingga sampai saat ini proses penyebaran masih dilakukan. Namun meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang belum terlibat aktif dan kurangnya antusias warga masyarakat dalam program desa tangguh bencana tersebut.
  - b) Pada tahun 2017 desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan mendapatkan apresiasi dari Provinsi Jawa Timur sebagai desa tangguh pratama. Namun apresiasi yang diberikan tersebut desa Sirnobojo masih belum mampu dikatakan tangguh karena masih adanya kekurangan-kekurangan pada program desa tangguh bencana tersebut seperti masyarakat desa Sirnobojo serta karang taruna desa Sirnobojo masih

belum antusias terhadap pentingnya pengelolaan bencana. Karang taruna desa Sirnobojo masih belum semuanya terlibat aktif

- c) Program desa tangguh bencana yang dibentuk tahun 2012 tersebut dalam pendanaan untuk pengembangan program desa tangguh bencana mampu menggunakan anggaran dari dana desa. Berkaitan dengan pendanaan, desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan sudah mampu membiayai secara mandiri pada tahun 2017 dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja desa yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program desa tangguh bencana.
  - d) Keterlambatan dalam proses evakuasi pada saat terjadi bencana banjir karena masih kurangnya kapasitas dari tim relawan desa tangguh bencana.
  - e) Program desa tangguh bencana tersebut masih belum dapat dikatakan tangguh oleh warga desa Sirnobojo karena masih perlu adanya pembaruan-pembaruan yang dapat menunjang program tersebut menjadi lebih baik.
2. Evaluasi Program desa tangguh bencana dalam penanggulangan banjir berdasarkan evaluasi CIPP adalah :
- a. *Context* :
    - 1) Terbentuknya suatu peraturan desa tersebut berdasarkan dari latar belakang dalam menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program serta untuk mengidentifikasi kondisi berbagai isu, kesempatan, dan kendala yang ada di dalam



lingkungan program. Desa Sirnobojo tersebut menganggap bahwa perlunya disusun suatu peraturan tersebut mengingat bahwa program desa tangguh bencana tersebut dilihat dari beberapa hal yaitu secara ekonomi dan material yang bertujuan untuk meminimalisir atau pengurangan resiko bencana serta kegiatan penanggulangan bencana banjir. Sehingga dengan demikian maka program desa tangguh bencana yang dibentuk sejak tahun 2012 tersebut sudah membentuk peraturan desa supaya digunakan sebagai rambu-rambu untuk proses pengurangan resiko bencana dan penyelenggaraan penanggulangan banjir.

b. *Input :*

- 1) Evaluasi masukan tersebut berkaitan dengan perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas. Secara keseluruhan pada evaluasi masukan sudah cukup baik. Berkaitan dengan perencanaan tersebut dilakukan melalui kegiatan seperti membuat peta jalur evakuasi, membuat peta rawan bencana yang kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menempel stiker-stiker di rumah-rumah warga desa Sirnobojo untuk memberikan suatu pendekatan alternatif dalam evaluasi input perencanaan dalam rangka pemahaman terhadap bencana dan penanggulanagan banjir.

- 2) Evaluasi input dalam kelembagaan di forum pengurangan resiko bencana tersebut yaitu membantu penyebaran informasi kepada seluruh warga desa Sirnobojo. Kegiatan yang dilakukan pada kelembagaan tersebut membantu berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan dengan program tersebut.
- 3) Pada pendanaan terkait dengan program desa tangguh bencana yang dana awal menggunakan dana dari APBN tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pengurangan resiko bencana. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi, serta pembentukan kelompok industri yang berfungsi sebagai ketahanan ekonomi pada desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan.
- 4) Berkaitan dengan pengembangan kapasitas maka dalam rangka penyelenggaraan program desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana banjir tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan dan pelatihan kepada semua anggota yang tergabung dalam program desa tangguh bencana supaya dapat merespon bencana dengan cepat, tepat, efektif dan benar.

c) *Process*

- 1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui mitigasi seperti penanaman pohon di daerah-daerah tertentu di beberapa

titik longsor termasuk daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, serta kegiatan resik sungai yang dilakukan dibantaran pinggiran sungai dengan menanami pohon.

- 2) Proses penyelenggaraan program desa tangguh bencana pada desa sirnobojo kabupaten Pacitan tersebut belum membuat rencana kontigensi Hal tersebut menjadi kendala pada saat banjir besar pada tahun 2017.
- 3) Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnobojo adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi, kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa yang menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur kelompok. Namun pada kenyataannya karang taruna desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan belum ikut tergabung di dalam forum tersebut kelompok karang taruna desa Sirnobojo tidak semuanya ikut andil dan tidak tergabung dalam kelompok Forum Pengurangan Resiko Bencana.

d. *Product* :

- 1) Perencanaan yang sudah dibuat oleh desa Sirnobojo kabupaten Pacitan dirasa masih belum maksimal. Hal tersebut karena

permasalahan yaitu masyarakat belum paham terhadap program desa tangguh bencana, warga masyarakat belum mengetahui tentang ancaman bencana langkahnya melakukan simulasi beheran tentang ancaman bencana

- 2) Program desa tangguh bencana yang seharusnya menjadi program yang mampu membawa perubahan terhadap masyarakat namun belum memberikan dampak perubahan secara keseluruhan terhadap masyarakat karena masih kurangnya antusias masyarakat, selain itu belum dibentuknya rencana kontigensi berpengaruh terhadap pertolongan pada saat banjir tahun 2017.
- 3) Berkaitan dengan kelembagaan, relawan yang ada belum mampu dikatakan tangguh karena pada saat bencana banjir tahun 2017, relawan yang sudah diberi pelatihan simulasi kebencanaan tidak mampu melakukan efakuasi terhadap masyarakat, dan bahkan yang membantu proses efakuasi adalah nelayan desa Sirnobojo yang tidak tergabung dalam relawan atau kader desa tangguh bencana. Karang taruna desa Sirnobojo masih kurang berpartisipasi terhadap program desa tangguh bencana tersebut. Sehingga berpengaruh terhadap melemahnya pertolongan pada saat terjadi bencana banjir.
- 4) Pogram desa tangguh bencana yang dibentuk sejak tahun 2012 tersebut masih belum maksimal membawa perubahan kepada

masyarakat secara menyeluruh. Selain itu pendekatan penyebaran informasi dirasa masih kurang karena masih terdapat warga masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Namun dari pihak kader desa tangguh bencana sudah merasa ada perubahan terkait dengan adanya program desa tangguh bencana tersebut.

- 5) Pengembangan kapasitas tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan, namun juga ada pengembangan dari desa tangguh bencana menjadi desa pesisir tangguh. Namun pendidikan dan pelatihan tentang simulasi kebencanaan tersebut masih belum membuahkan hasil yang baik terbukti pada saat terjadi bencana tahun 2017 relawan yang tergabung tersebut tidak mampu membantu dalam melakukan evakuasi terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan fenomena yang ditemukan di lapangan, maka berikut ini merupakan saran dari peneliti antara lain:

1. BPBD Kabupaten Pacitan harus segera membuat rencana kontigensi, serta memilih sumber daya manusia yang berkompeten untuk terlibat karena berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 terdapat suatu perencanaan kontigensi dalam program desa tangguh bencana. Apabila rencana kontigensi tersebut di bentuk maka jika terjadi bencana banjir setiap orang

yang berkepentingan tergabung dalam penyusunan rencana kontigensi tersebut akan memiliki rasa tangguh jawab sesuai dengan tugasnya.

2. Harus ada pembaruan strukstur organisasi desa tangguh bencana serta meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan tentang desa tangguh bencana karena dalam hal ini relawa-relawan yang ada masih belum tangguh apabila terjadi bencana banjir .
3. Nelayan desa Sirnobojo perlu diberikan pendidikan dan pelatihan bahkan harus dilibatkan dalam program desa tangguh bencana, karena nelayan desa tersebut yang membantu proses efakuasi terhadap masyarakat. Sehingga apabila nelayan tersebut dilibatkan dalam program desa tangguh bencana maka apabila bencana banjir terjadi maka proses efakuasi menjadi lebih cepat dan tanggap serta merubah relawan yang sebelumnya tidak tangguh menjadi tangguh dan masyarakat dapat merasakan manfaat adanya program desa tangguh bencana tersebut.
4. Sebaiknya karang taruna desa Sirnobojo tergabung dalam forum pengurangan resiko bencana. Sehingga karang taruna desa Sirnobojo dapat terlibat aktif membantu semua kegiatan yang berhubungan dengan program desa tangguh bencana dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana banjir. Selain itu apabila karang taruna desa Sirnobojo tergabung dalam forum pengurangan resiko bencana tersebut maka akan menimbulkan antusias dari semua karang taruna desa Sirnobojo mengingat terdapat tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta : PT.Bumi Akasara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016. “Potensi dan Ancaman Bencana”, diakses pada tanggal 01 Oktober 2017 <https://www.bnpb.go.id/home/potensi>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017. “Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”, diakses pada tanggal 08 Januari 2018 <https://bnpb.go.id/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017. “2.341 Kejadian Bencana, 377 Tewas dan 3,5 Juta Jiwa Mengungsi dan Menderita Akibat Bencana Tahun 2017”, diakses pada 08 Januari 2018 <https://bnpb.go.id/2341-kejadian-bencana-377-tewas-dan-35-juta-jiwa-mengungsi-dan-menderita-akibat-bencana-tahun-2017>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016. “Laporan Harian Pusdalops”. diakses pada 03 Oktober 2017 [http://files.bpbdd.jatimprov.go.id/LAPHAR/2016/03\\_MARET/27\\_03.pdf](http://files.bpbdd.jatimprov.go.id/LAPHAR/2016/03_MARET/27_03.pdf)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2017. ”Sirnoboyo Desa Tangguh Bencana”, diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 <http://bpbdd.pacitankab.go.id/sirnoboyo-desa-tangguh-bencana/>.
- BBC Indonesia, 2016.”Jumlah bencana di Indonesia mencapai rekor pada 2016”, diakses pada tanggal 02 Oktober 2017<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38456759>.
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan, 2009
- Crawford, John. 2000. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London : Aslib, the association for information management and information management international.
- Danar, Oscar, Radian & Pushpalal, Dini. 2014. *Building Community Resilience: Conceptual Framework and its Application in Post Tsunami Resettlement*. Jurnal Antropologi. Volume 16

- Hadi, Purnomo. & Sugiantoro, Roni. 2009. *Manajemen Bencana respon dan Tindakan Terhadap Bencana*. Jakarta: Media Persindo.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sinergikan Program Desa Tangguh Bencana, 2014, diakses pada tanggal 03 Oktober 2017 <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-sinergikan-program-desa-tangguh-bencana>.
- Kodoatie, Robert & Sjarief, Roestam. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor, kekeringan dan Tsunami*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Kodoatie, Robert & Roestam Syarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta : ANDI.
- Mistra. 2007. *Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir*. Jakarta : Griya Kreasi.
- Mutrofin. 2010. *Evaluasi Program*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta : UNY.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurjanah.et.all. 2013. *Manajemen Bencana*. Jakarta : Alfabeta.CV.
- Pacitan News, 2017. "Desa Berhadapan Langsung Dengan Bencana", diakses pada tanggal 02 Oktober 2017 <http://pacitannews.com/2017/08/30/desa-berhadapan-langsung-dengan-bencana/>.
- Pacitan News, 2017. "Banjir Dan Tanah Longsor Di Pacitan Memakan Korban Jiwa", diakses pada tanggal 06 Desember 2017 <http://pacitannews.com/>.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PPT Desa Sirnobojo Desa Tangguh Bencana, 2017
- Priambodo, Roestam. 2013. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana badai-banjir-gempabumi-letusan gunung berapi, kerusakan massal terror bom, kebakaran-polusi lingkungan*. Knisius : Yogyakarta.

- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta : PT.Dian Rakyat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suprawoto. 2008. *Memahami Bencana Informasi Tindakan Masyarakat Mengurangi Resiko Bencana*. Jakarta:Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Suprijono, Agus. 2011. *Model Pembelajaran Kooperatif*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung : Falah Production.
- Suharto, Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Stufflebeam, L, Daniel. 2007. *CIPP Evaluation Model Checklist*. diakses pada tanggal 26 Desember 2017 melalui [www.wmich.edu/evalctr/checklist](http://www.wmich.edu/evalctr/checklist).
- Tayibnapis, Farida, Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen, Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Twigg, Jhon. 2009. *Characteristics of a Disaster-Resilient Community*. DFID : A Guidance Note Version 2.
- UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia,Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Yulaelawati, Ella & Syihab, Usman. 2008. *Mencerdasi Bencana*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.